eISSN 3090-6431 & pISSN 3090-644X
SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/c1sab960
Hal. 3218-3230
Homepage https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/sujud

Fenomena Politik Uang dalam Pemilu 2024 di Lingkungan Masyarakat Perdesaan

Hidayah Rahman
Prodi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

*Email Korespodensi: hidayah.rahmann@uho.ac.id

Diterima: 27-10-2026 | Disetujui: 03-11-2026| Diterbitkan: 05-11-2026

ABSTRACT

This study describes community perceptions of money politics and examines its perceived influence on voting choices in the 2024 general election in Bea Village, Kabawo District, Muna Regency. A qualitative ethnographic approach employed participant observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected purposively, and data were analyzed through selection, categorization, interpretation, and conclusion drawing. The findings identify three perspectives: money politics as an opportunity to obtain money, a sinful act, and a violation of electoral ethics. Some informants regarded payments as transportation, fuel, or cigarette money, linking acceptance to everyday needs, established practices, and distrust of candidates after election. Other informants rejected payments on religious grounds or criticized their ethical implications. Local intermediaries, known as peluncur, connected candidates and voters. Informants associated payments with willingness to vote and candidate preferences, while acknowledging that payments did not guarantee election. These qualitative findings support political education grounded in local experiences, participatory oversight, attention to economic needs, and continuing accountability between elected representatives and residents.

Keywords*: money politics; 2024 election; voter perceptions; electoral intermediaries; Bea Village.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap politik uang serta menganalisis pengaruh yang dirasakan terhadap pilihan warga pada Pemilu 2024 di Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposif. Analisis dilakukan melalui pemilahan data, pengelompokan kategori, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tiga pandangan, yaitu politik uang sebagai kesempatan memperoleh uang, perbuatan dosa, dan pelanggaran etika pemilihan. Sebagian informan memaknai pemberian sebagai uang transportasi, bensin, atau rokok. Penerimaan berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, kebiasaan sosial, dan ketidakpercayaan terhadap perhatian calon setelah terpilih. Informan lain menolak pemberian atas dasar agama atau mengkritik implikasi etisnya. Peluncur menghubungkan calon dengan warga melalui penyaluran uang. Menurut keterangan informan, pemberian memengaruhi motivasi menggunakan hak pilih dan preferensi calon. Informan juga mengakui bahwa pemberian tidak menjamin keterpilihan. Temuan kualitatif ini mendukung pendidikan politik yang dekat dengan pengalaman warga, pengawasan partisipatif, perhatian terhadap kebutuhan ekonomi, dan hubungan pertanggungjawaban yang berkelanjutan antara pemimpin dan masyarakat.

Kata kunci: politik uang; Pemilu 2024; pandangan pemilih; perantara elektoral; Desa Bea.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Rahman, H. (2026). Fenomena Politik Uang dalam Pemilu 2024 di Lingkungan Masyarakat Perdesaan. Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 2(4), 3218-3230. https://doi.org/10.63822/c1sab960

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan ruang bagi warga untuk menentukan wakil politik dan menyampaikan kepentingannya melalui penggunaan hak suara. Dalam praktik politik lokal, hubungan antara calon dan pemilih juga berlangsung melalui pemberian uang, barang, serta bantuan yang dikaitkan dengan dukungan elektoral. Hubungan tersebut membentuk pengalaman masyarakat dalam menilai calon, memahami manfaat pemilu, dan menentukan pilihan. Politik uang menjadi persoalan yang perlu dikaji melalui pengalaman warga karena penerimaan terhadap pemberian dapat memperoleh pembenaran dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian warga terhadap uang yang diterima memperlihatkan hubungan antara kepentingan ekonomi, kepercayaan kepada pemimpin, serta nilai moral yang dijadikan pedoman bertindak.

Kajian mengenai pemilu di Indonesia memperlihatkan peran jaringan personal dan pembagian sumber daya dalam upaya memperoleh dukungan. Aspinall (2014a) menjelaskan penggunaan jaringan perantara serta pemberian manfaat material dalam persaingan calon legislatif. Aspinall dan Rohman (2017) juga menunjukkan kedudukan politik uang dan perantara dalam kompetisi politik di tingkat desa. Temuan tersebut memberikan dasar untuk menempatkan pemberian uang sebagai bagian dari hubungan sosial yang terbentuk selama proses pemilihan. Calon membutuhkan dukungan warga, perantara menghubungkan calon dengan kelompok pemilih, dan warga menilai pemberian berdasarkan pengalaman serta kepentingan yang mereka hadapi.

Dari sisi masyarakat, Fitriani et al. (2019) menguraikan keterkaitan keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan pengawasan dengan praktik politik uang di Desa Sandik. Lukmajati (2016) mengkaji persepsi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pemilu legislatif di Kabupaten Blora. Muhtadi (2013) memperlihatkan pentingnya hubungan identifikasi kepartaian dan toleransi terhadap pemberian elektoral. Berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa penjelasan politik uang memerlukan perhatian pada penilaian pemilih dan lingkungan sosial tempat keputusan politik terbentuk. Kondisi ekonomi perlu dibaca bersama pengalaman berhubungan dengan calon dan lembaga politik.

Politik uang juga berkaitan dengan pengorganisasian kampanye dan hubungan kekuasaan. Aspinall (2014b) membahas perantara, jaringan sosial, dan persoalan loyalitas dalam mobilisasi elektoral. Hicken et al. (2022) menunjukkan pentingnya kedudukan perantara dalam distribusi pemberian kampanye serta keterbatasan pemantauan terhadap perilaku pemilih. Berenschot (2018) menempatkan klientelisme dalam hubungan ekonomi politik yang lebih luas, termasuk penguasaan sumber daya dan kemampuan masyarakat mengawasi elite. Kerangka tersebut membantu membaca konteks desa secara lebih hati-hati. Penerimaan uang perlu ditelusuri melalui hubungan konkret antara warga, penyalur, serta calon yang memberikan bantuan.

Di Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, hasil penelitian mencatat pemberian uang yang disebut sebagai uang transportasi, uang bensin, dan uang rokok. Orang yang menyalurkan pemberian dari calon dikenal dengan sebutan peluncur. Sebagian warga menganggap pemberian sebagai kesempatan memperoleh manfaat langsung menjelang pemilihan. Anggapan tersebut berkaitan dengan pengalaman bahwa calon sulit ditemui setelah memperoleh jabatan. Dalam situasi ini, uang yang diterima menjadi manfaat yang dapat segera digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau perjalanan menuju tempat pemungutan suara.

Penilaian warga juga memuat keberatan moral dan etis. Informan menyebut politik uang sebagai perbuatan dosa dan tindakan yang melanggar etika pemilihan. Sebagian informan mengkritik praktik

tersebut sambil mengakui kuatnya kebiasaan menerima pemberian dalam lingkungan sosial mereka. Keberagaman sikap ini perlu dipertahankan dalam analisis agar masyarakat Desa Bea tidak diperlakukan sebagai kelompok dengan pendapat seragam. Penerimaan, penolakan, serta kritik terhadap politik uang menjadi bagian dari temuan yang menjelaskan dinamika politik lokal.

Penelitian ini berfokus pada pemaknaan warga terhadap politik uang serta pengaruh yang mereka rasakan dalam menentukan kehadiran dan pilihan pada Pemilu 2024. Kekhususan kajian terletak pada hubungan antara penyebutan uang transportasi, pengalaman ketidakpercayaan kepada calon, peran peluncur, serta pertimbangan dosa dan etika dalam satu konteks desa. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan pandangan masyarakat Desa Bea terhadap politik uang dan menganalisis keterkaitannya dengan pilihan warga serta peluang keterpilihan calon berdasarkan keterangan informan. Pembahasan diarahkan pada makna tindakan dan pengalaman sosial yang terekam dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi di Desa Bea, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan praktik politik uang yang menjadi perhatian penelitian. Kerja lapangan dalam laporan penelitian dinyatakan berlangsung pada September hingga November 2024. Metode etnografi digunakan untuk memahami pandangan warga, istilah yang mereka gunakan, dan hubungan sosial yang menyertai penerimaan atau penolakan pemberian. Pemahaman terhadap pengalaman informan mengikuti perhatian etnografi pada pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang diteliti (Spradley, 1997).

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mengenai politik uang serta status sebagai warga yang memiliki hak pilih. Informan mencakup kepala desa sebagai informan kunci dan warga dengan latar pekerjaan ibu rumah tangga, petani, pedagang, wiraswasta, serta buruh harian lepas. Keterangan pemilih pemula juga digunakan dalam pembahasan. Keragaman latar informan memberi ruang untuk membaca pandangan mengenai manfaat ekonomi, pertimbangan agama, etika pemilihan, dan pengalaman mengikuti pemilu.

Data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pengamatan diarahkan pada interaksi warga, perbincangan mengenai pemilihan, serta hubungan antara penyalur dan penerima pemberian. Wawancara mendalami pandangan terhadap politik uang, alasan menerima atau menolak pemberian, dan keterkaitan uang dengan keputusan menggunakan hak pilih. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi gambaran lokasi dan data pemilih. Keterangan mengenai peristiwa pemilu disajikan sesuai kedudukannya dalam naskah sebagai hasil pengamatan atau penuturan informan.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui penelaahan data, pemilahan informasi yang relevan, pengelompokan kategori, interpretasi hubungan antarkategori, dan penarikan kesimpulan. Kategori utama mengikuti temuan mengenai kesempatan memperoleh uang, perbuatan dosa, pelanggaran etika, keengganan memilih tanpa pemberian, dan peluang keterpilihan calon. Pembahasan memanfaatkan konsep tindakan rasional yang dijelaskan oleh Weber (1947) dan konsep motivasi kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow (1943), sesuai arah analisis naskah sumber. Kutipan informan dipertahankan dalam ragam tutur aslinya untuk menjaga makna pengalaman yang disampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Konteks Sosial dan Hubungan Elektoral di Desa Bea

Desa Bea merupakan lokasi penelitian dengan kehidupan warga yang mencakup kegiatan pertanian, perdagangan, pekerjaan informal, serta urusan rumah tangga. Data kependudukan dalam naskah mencatat 803 penduduk, terdiri atas 471 laki-laki dan 332 perempuan. Arsip Kantor Camat Kabawo tahun 2024 yang digunakan penelitian mencatat daftar pemilih tetap Desa Bea sebanyak 507 orang, terdiri atas 253 laki-laki dan 254 perempuan. Angka tersebut memberikan konteks mengenai penduduk dan warga yang memiliki hak pilih. Data ini menjadi latar deskriptif bagi pembacaan praktik politik uang di lingkungan desa.

Profil informan memperlihatkan keterlibatan warga dengan sumber penghidupan yang beragam. Petani dan buruh bergantung pada kegiatan kerja sehari-hari, pedagang menjalankan usaha, dan ibu rumah tangga terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam penjelasan hasil penelitian, keterbatasan penghasilan menjadi salah satu alasan pemberian uang mendapat perhatian. Manfaat uang dinilai melalui kegunaannya secara langsung, termasuk membeli bahan bakar dan memenuhi kebutuhan kecil. Keadaan tersebut memberi konteks bagi munculnya pandangan bahwa masa pemilu menyediakan kesempatan memperoleh tambahan uang.

Hubungan sosial di desa memberi ruang bagi penyaluran pemberian melalui orang yang dikenal warga. Naskah menyebut peluncur sebagai perantara yang dipercaya calon untuk membagikan uang kepada pemilih. Pemberian melalui perantara memungkinkan calon menjangkau warga melalui hubungan setempat. Posisi peluncur menunjukkan bahwa peredaran uang berlangsung melalui jaringan sosial yang telah tersedia dalam masyarakat. Dengan membaca hubungan tersebut, politik uang dapat dipahami sebagai praktik yang melibatkan pengetahuan mengenai warga, kedekatan personal, serta kepentingan memperoleh dukungan.

Konteks sosial ini perlu digunakan secara proporsional. Pekerjaan dan kondisi ekonomi informan membantu menjelaskan alasan yang mereka sampaikan. Hubungan sebab akibat antara tingkat pendidikan, kemiskinan, dan penerimaan uang belum dapat dihitung melalui data yang tersedia. Analisis berikut berangkat dari keterangan informan serta deskripsi lapangan. Penilaian mengenai pengaruh uang ditempatkan sebagai pengalaman dan pemahaman warga yang diwawancarai.

2 Politik Uang sebagai Kesempatan Memperoleh Uang

Pandangan pertama menempatkan pemilihan sebagai kesempatan memperoleh manfaat material. Pemberian dari calon dianggap dapat diterima karena warga lain juga mengambilnya dan kesempatan serupa hadir mengikuti siklus pemilihan. Wa Fae mengungkapkan pertimbangan tersebut dalam wawancara berikut.

> *"Politik uang dimasyarakat ini, tidak bisa kita pungkiri karena biar saya tidak mau ambil uang yang dikasih peluncurnya, tapi ingka orang lain ambil. Rugimi lagi saya. Heheheheh.... Jadi menurut saya tidak masalah karena kesempatanta juga dapat uang ini lama lagi baru pemilihan jadi saya ambil saja" (wawancara 2024)*

Pernyataan Wa Fae menunjukkan pertimbangan mengenai keuntungan yang diterima warga lain dan kemungkinan kehilangan kesempatan memperoleh uang. Ungkapan mengenai kerugian pribadi memperlihatkan bahwa keputusan menerima uang berlangsung dengan memperhatikan tindakan orang di sekitarnya. Penerimaan pemberian memperoleh dukungan dari kebiasaan bersama yang dilihat informan.

Dalam pengalaman ini, masa pemilihan mempunyai arti ekonomi karena menyediakan manfaat yang dapat diterima secara langsung dari pihak yang membutuhkan dukungan.

Penilaian terhadap pemberian juga dibangun melalui alasan biaya perjalanan menuju tempat pemungutan suara. La SN menjelaskan kegunaan uang untuk membeli bahan bakar dan rokok saat pergi memilih.

> *"selagi saya tidak minta, kalau dikasih untuk pergi memilih, saya ambil saja karena jarak rumah ke TPS sa harus naik motor. Lumayan juga kalau dikasih 100 ribu, dipake untuk beli bensin saja tapi wajar sajami, ingka ada juga aturannya dari KPU. Yang penting tidak banyak-banyak, ambil mi saja pembeli rokok dengan pembeli bensin kalau pergi memilih nanti. Baru peluncurnya calon-calon juga mereka menawarkan lumayan juga dapat uang dadakan ingka"(wawancara 2024)*

Kutipan tersebut memperlihatkan penggunaan istilah uang transportasi sebagai alasan menerima pemberian. Nominal Rp100.000 disebut informan sebagai jumlah yang dapat digunakan untuk membeli bensin. Ucapan mengenai aturan KPU merupakan pemahaman informan dan perlu dibaca sebagai bagian dari data wawancara. Artikel ini tidak menjadikan ucapan tersebut sebagai dasar penetapan kebolehan pemberian. Kedudukan data terletak pada cara informan membenarkan penerimaan uang melalui kebutuhan perjalanan serta anggapan mengenai kewajaran jumlah pemberian.

Ungkapan uang dadakan memperjelas arti manfaat langsung bagi penerima. Warga tidak perlu menunggu realisasi program setelah pemilu untuk memperoleh sesuatu dari calon. Uang dapat segera digunakan dan keberadaannya dapat dirasakan pada saat diterima. Dalam pembacaan tindakan rasional, pilihan menerima uang berkaitan dengan tujuan praktis yang dianggap dapat dicapai melalui tindakan tersebut (Weber, 1947). Penjelasan ini membantu memahami alasan informan tanpa mengubah penilaian etis terhadap praktik yang sedang diteliti.

Teori motivasi Maslow (1943) memberi sudut pandang untuk membaca perhatian terhadap kebutuhan sehari-hari. Uang yang digunakan untuk bahan bakar dan kebutuhan kecil mempunyai nilai karena berhubungan dengan keterbatasan sumber daya rumah tangga. Penggunaan teori ini terbatas pada pemahaman mengenai alasan material yang dinyatakan informan. Data tidak memuat pengukuran tingkat kebutuhan setiap rumah tangga. Oleh karena itu, keterkaitan kebutuhan dan penerimaan uang dibaca melalui penuturan warga mengenai kegunaan pemberian.

3 Kebiasaan Menerima dan Ketidakpercayaan kepada Calon

Penerimaan politik uang berkaitan dengan pengalaman warga mengenai perilaku calon setelah terpilih. Sebagian informan menilai bahwa hubungan dengan masyarakat menjadi renggang setelah calon memperoleh jabatan. Masa pemilihan lalu dipandang sebagai kesempatan mendapatkan manfaat yang lebih pasti. Wa TN menyampaikan penilaiannya sebagai berikut.

> *"sudah jadi kebiasaan mi juga disini karena kalau ada calon yang tidak kasih biar uang pada saat pemilihan, kentara mi juga pangkeanya dari awal. Soalnya juga, kalau mereka terpilih, susah mi juga mau baleki masyarakat. Jadi, kita ambilmi saja itu uangnya. Akhirnya, politik semakin membudaya dan menjadi hal yang biasa saja dan tidak perlu dipermasalahkan"*

Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan antara kebiasaan menerima uang dan penilaian terhadap calon. Ketiadaan pemberian dipakai untuk menilai kesediaan calon memperhatikan masyarakat sejak awal. Dalam kerangka pengalaman informan, pemberian menjadi tanda yang mudah dilihat, diterima,

dan dibandingkan. Janji mengenai perhatian pada masa mendatang dinilai melalui pengalaman pemilihan sebelumnya. Ketidakpercayaan kepada realisasi janji memberi alasan bagi warga untuk mengambil manfaat yang telah tersedia.

Pengulangan praktik dalam setiap pemilihan turut membentuk harapan sosial. Warga terbiasa melihat calon atau penyalur memberikan uang. Kebiasaan tersebut membuat pemberian tampak sebagai bagian yang melekat pada kegiatan pemilihan. Istilah membudaya dalam penuturan dan uraian sumber menunjukkan proses pembiasaan yang diakui informan. Istilah tersebut tidak perlu diperluas menjadi anggapan bahwa seluruh masyarakat menerima politik uang dengan alasan yang sama. Kehadiran sikap menolak dalam penelitian menunjukkan keberagaman penilaian di dalam lingkungan desa.

Hubungan antara kepercayaan politik dan toleransi terhadap pemberian dapat dibaca bersama kajian Muhtadi (2013). Kajian tersebut memberi perhatian pada hubungan warga dengan partai dan kredibilitas lembaga politik. Dalam konteks Desa Bea, informasi utama berasal dari pengalaman informan mengenai calon yang sulit kembali menemui masyarakat. Keterangan tersebut memperlihatkan arti pengalaman politik dalam membentuk keputusan sehari-hari. Penerimaan uang juga memuat penilaian warga mengenai timbal balik yang mereka harapkan dari hubungan dengan calon.

4 Penolakan Politik Uang sebagai Perbuatan Dosa

Temuan penelitian juga memperlihatkan penolakan terhadap pemberian. Wa Afi menyatakan bahwa menerima uang untuk kepentingan pemilihan merupakan perbuatan dosa. Ia menghubungkan penolakan dengan keinginan memilih pemimpin melalui pertimbangan pribadi.

> *"saya tidak mengambil uang dari penyalur-penyalur karna saya tau itu perbuatan dosa walau saya orang susah saya tidak mau tambah dosa dengan hal seperti ini saya juga mau memilih kepala daerah melalui hati saya saya liat mana yang tulus untuk mempimpin negara desa dan lainnya.". (wawancara september 2024).*

Penolakan Wa Afi menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghasilkan tindakan yang seragam. Informan mengakui keadaan hidupnya dan tetap menjadikan pertimbangan dosa sebagai pedoman mengambil keputusan. Nilai agama memberi batas terhadap manfaat yang bersedia diterima. Keputusan memilih juga dikaitkan dengan penilaian mengenai ketulusan calon. Dalam pengalaman ini, hak suara mempunyai arti moral yang dijaga melalui penolakan terhadap uang dari penyalur.

Konsep rasionalitas berorientasi nilai dalam pemikiran Weber (1947) membantu membaca tindakan tersebut. Tindakan memperoleh arah melalui keyakinan yang dipandang layak dipertahankan. Pertimbangan informan menghubungkan keputusan menerima uang dengan tanggung jawab pribadi. Analisis ini tetap bertumpu pada pernyataannya mengenai dosa dan keinginan memilih melalui hati. Penolakan memperlihatkan kedudukan nilai dalam praktik politik warga.

Keberadaan sikap ini penting bagi pembacaan antropologis. Kebiasaan sosial selalu dihadapi oleh individu yang mempunyai pengalaman dan pedoman penilaian sendiri. Dalam penelitian ini, penerimaan yang dianggap lumrah hadir bersama penolakan atas dasar agama. Penilaian warga terhadap politik uang mencakup manfaat, tanggung jawab, dan kelayakan tindakan. Dengan mempertahankan suara informan yang menolak, hasil penelitian memperlihatkan ruang bagi pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai di tengah kebiasaan menerima pemberian.

5 Kesadaran mengenai Pelanggaran Etika Pemilihan

Pandangan berikutnya menempatkan politik uang sebagai pelanggaran etika pemilihan. Informan memahami pemberian sebagai bentuk penyogokan atau pembelian suara. Pengetahuan tersebut hadir bersama pengakuan bahwa uang tetap diterima dalam kehidupan politik setempat. La Maisa menyampaikan penilaian berikut.

> *"Politik uang menurut saya sangat tidak bagus. Apalagi politik uang menjadi hal yang biasa dimasyarakat. Politik uang ini sebenarnya sudah melanggar etika pemilihan. Kalau dikasih uang begitu kan sama halnya dengan disogok tapi calon juga tidak sungkan mengeluarkan uang untuk pemilih. Siapa yang tidak mau uang sekarang. Kalau dikasih, ambil saja. Sebenarnya saya tidak sependapat dengan adanya politik uang ini. Istilahnya beli suara masyarakat tapi mau diapa, sudah begitumi budaya pemilihan". (wawancara september 2024).*

Kutipan La Maisa memuat kritik etis serta pengakuan terhadap kebiasaan menerima uang. Ia menyebut pemberian sebagai tindakan menyogok dan membeli suara. Pada saat yang sama, penilaiannya terhadap lingkungan sosial menempatkan penerimaan sebagai tindakan yang terus berlangsung. Data ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai etika belum selalu diikuti penolakan terhadap pemberian. Penilaian pribadi, kebutuhan material, dan kebiasaan sosial berada dalam proses pertimbangan yang sama.

Saifudin juga menilai bahwa politik uang melanggar etika. Perhatiannya tertuju pada penerimaan pemberian dari lebih dari satu calon.

> *"politik uang harusnya dicegah mi namun sudah merajalela dimasyarakat. Karena politik uang juga ini, akhirnya masyarakat juga merasa kalau dikasih uang tetap diambil. Biasa juga, biar sudah ambild ari calon lain, tetap ambil lagi kalau dikasih. Makanya sa bilang, melanggar etika pemilihan" (wawancara September 2024)*

Keterangan tersebut penting karena penerimaan uang dari seorang calon tidak dapat langsung diperlakukan sebagai bukti pilihan yang pasti. Warga dapat menerima pemberian dari calon lain. Hubungan antara pemberian dan dukungan memuat ketidakpastian yang diakui dalam data. Penelitian Aspinall et al. (2017) mengenai strategi dan efektivitas pembelian suara serta kajian Hicken et al. (2022) mengenai perantara memberi konteks untuk membaca persoalan tersebut. Temuan Desa Bea tetap berdiri pada penuturan informan mengenai penerimaan yang berulang.

Kesadaran etis yang disampaikan informan memperlihatkan kemungkinan titik masuk pendidikan politik. Materi pendidikan perlu membahas alasan warga tetap menerima uang setelah mengetahui keberatan moralnya. Djuyandi dan Mahmuda (2024) membahas pembagian uang menjelang pemungutan suara sebagai praktik yang mengancam nilai demokrasi. Kajian tersebut memperkuat relevansi pembahasan pendidikan politik dan integritas pemilihan. Kritik terhadap politik uang juga perlu ditempatkan bersama perhatian pada hubungan warga dengan calon dan harapan mengenai pelayanan setelah pemilu. Baehaki (2021) menguraikan kendala pencegahan yang mencakup pengawasan, pembuktian, dan kerja sama masyarakat. Kajian tersebut memberi dukungan pada kebutuhan penanganan yang menyentuh praktik sosial di tingkat lokal.

6 Uang Transportasi dan Keputusan Menggunakan Hak Pilih

Pengaruh politik uang dalam penelitian tampak pada penuturan mengenai keengganan pergi memilih tanpa pemberian. Uang transportasi menjadi bagian dari alasan yang digunakan untuk menjelaskan

kehadiran di tempat pemungutan suara. IR menyampaikan pengalaman dan pengamatannya terhadap pemilih muda.

> *"Berpengaruh sekali, soalnya banyak juga masyarakat yang malas pergi memilih kalau tidak dikasih uang trasnport begitu. Apa lagi pemilih pemula kaya kita ini malas pergi kalau tidak ada uangnya, siapa yang mo pilih kalau tidak ada transportnya bela. Tidak adami istilah keluarga kalau politik sekarang eee"*

Keterangan Irfan memperlihatkan hubungan antara insentif material dan motivasi menggunakan hak suara. Pemberian dipahami sebagai biaya yang menyertai tindakan pergi memilih. Pernyataannya mengenai hubungan keluarga menunjukkan penilaian bahwa kedekatan kekerabatan tidak selalu cukup untuk menggerakkan dukungan. Dalam pengalaman yang disampaikan, calon perlu menyediakan manfaat yang dianggap relevan dengan keperluan pemilih. Temuan ini mencatat arti uang dalam penalaran informan mengenai partisipasi.

La MJ juga menghubungkan kemampuan memberikan uang dengan peluang calon memperoleh dukungan. Penilaiannya disertai pengalaman bahwa perhatian kepada warga berkurang setelah calon mendapat jabatan.

> *"Iya toh, rata-rata yang lolos dewan, bupati dan gubernur sekarang yang kasih transport kalau pergi memilih. Sudah banyakmi kejadian, mereka kalau sudah duduk, malas mi liat kita masyarakat, tidak mau cari masyarakat miskin untuk dibantu. Diliat-liat saja juga. Baru mereka kasih juga uang supaya dipilih. Sa ambil saja juga. bagimana mau calon baru tidak ada uangnya. Stengah mati juga kalau begitu. Bisa jadi mereka tidak lolos kalau tidak ada uangnya. Yang kasih jg uang transport, belum tentu mereka terpilih apalagi yang tidak kasih"*

Pernyataan La Musulija memuat dua unsur penting. Pemberian uang dinilai membantu calon menjangkau pemilih, dan pemberian tetap tidak menjamin keterpilihan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa uang mempunyai arti strategis dalam persaingan calon serta tetap menghadapi ketidakpastian hasil. Data ini perlu dipertahankan karena memberi batas bagi kesimpulan penelitian. Pengaruh yang dirasakan warga tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai kepastian kemenangan calon.

Hasil wawancara juga memuat perkiraan nominal pemberian menurut tingkatan pemilihan berdasarkan wawancara warga. Perkiraan tersebut disajikan pada Tabel 1. Penyebutan jumlah mengikuti sumber dan tidak menunjukkan rata-rata, jumlah transaksi yang terverifikasi, atau total dana yang dikeluarkan calon.

Tabel 1. Perkiraan nominal pemberian menurut keterangan warga

Tingkatan	Perkiraan per pemilih	Keterangan dalam sumber
DPR RI	Rp50.000–Rp200.000	Bergantung pada kekuatan calon dan daerah pemilihan.
DPD	Rp30.000–Rp100.000	Disebut umumnya lebih rendah dari DPR RI.
Presiden	Tidak dicantumkan	Pemberian disebut tidak langsung kepada pemilih, melalui tim sukses atau logistik kampanye.

Tingkatan	Perkiraan per pemilih	Keterangan dalam sumber
DPR Provinsi	Rp20.000–Rp100.000	Sebutan pada tabel sumber; bervariasi menurut daerah.
DPRD Provinsi	Sama seperti DPR Provinsi	Tabel sumber menandai kemungkinan penulisan ganda.
DPRD Kabupaten/Kota	Rp150.000–Rp300.000	Disebut paling sering berlangsung langsung kepada warga.

Sumber: Wawancara warga Desa Bea. Nominal merupakan perkiraan; kategori provinsi dipertahankan sesuai tabel sumber.

Perbedaan nominal dalam tabel menunjukkan bahwa informan mengenali variasi pemberian pada tingkat pemilihan yang berbeda. Data tersebut bersifat perkiraan dan bergantung pada keterangan yang diperoleh peneliti. Nominal pada tingkat kabupaten atau kota dalam sumber disebut Rp150.000 sampai Rp300.000 per pemilih. Penjelasan mengenai pemberian pada pemilihan presiden mengacu pada jalur tim sukses atau logistik kampanye, sehingga tidak dapat disamakan dengan perkiraan uang tunai yang diterima langsung oleh setiap warga.

Penafsiran mengenai uang transportasi perlu memperhatikan keterkaitannya dengan harapan dukungan. Dalam data, pemberian dibicarakan bersama keputusan memilih dan peluang calon memperoleh suara. Penyebutan biaya transportasi memberi bahasa yang dekat dengan kebutuhan warga. Hubungan elektoralnya tampak melalui penuturan mengenai calon yang memberi uang dan keputusan warga mendatangi tempat pemungutan suara. Penjelasan ini menjaga kedudukan istilah lokal sebagai bagian dari cara warga memahami praktik yang dialami.

7 Peluang Keterpilihan Calon dan Pengalaman Pemilih Pemula

Pengaruh terhadap pilihan calon tampak dalam penuturan pemilih pemula yang menyatakan mengikuti calon pemberi uang. DD menjelaskan bahwa uang bensin dan uang rokok menjadi pertimbangan dalam pengalaman memilih.

> *"Yang saya liat itu, berpengaruh sekali karena masyarakat juga malas memilih. Jadi kalau ingin dipilih harus kasih uang bensin dengan uang rokoknya. Tapi kalau saya, sa pergi memilih mi saja karena calon peserta pemilu yang lolos itu yang bagi-bagi uang baru saya ini pemilih pemula jadi saya ikut-ikut saja siapa yang kasi uang itu yang saya pilih baru target sekrang anak muda banyak di kasi serangan."*

Pernyataan Dedi menunjukkan penggunaan pemberian sebagai petunjuk memilih. Ungkapan ikut-ikut memperlihatkan bahwa pengalaman pemilih pemula berkaitan dengan kebiasaan di lingkungan sosialnya. Pemilih muda mengenali tindakan calon membagikan uang dan menggunakannya dalam menilai pilihan yang tersedia. Penuturan ini memberi gambaran mengenai proses belajar politik melalui pergaulan sehari-hari. Data tidak memuat pengukuran terhadap seluruh pemilih pemula, sehingga pembahasan dibatasi pada pengalaman yang disampaikan informan.

La NK juga mengaitkan keputusan memilih dengan penerimaan uang dan penilaian mengenai hubungan calon dengan masyarakat setelah memperoleh jabatan.

"Politik uang sekarang ini sudah jadi rahasia umum mi. Tidak mau juga masyarakat memilih kalau tidak ada uang bensin dengan uang rokoknya. Tidak akan lolos juga kune kalau tidak ada uangnya. Bagimana masyarakat juga sudah tau kalau sudah lolos, tidak akan turun kemasyarakat. Jadi sa memilih kalau sa dikasih uang"

Keterangan La NK memperkuat temuan bahwa pemberian uang memperoleh arti dari pengalaman politik warga. Uang yang diterima menjadi manfaat yang dapat dirasakan segera. Ketidakpastian perhatian calon setelah terpilih memberi alasan bagi tindakan menerima pemberian. Keterpilihan dalam penuturan warga berkaitan dengan kemampuan calon memenuhi harapan material yang muncul menjelang pemilihan.

Dalam konteks ini, peluang memperoleh dukungan perlu dibedakan dari bukti kemenangan. Data wawancara menunjukkan bahwa sebagian informan menghubungkan uang dengan pilihan mereka dan menilai calon tanpa uang akan menghadapi kesulitan. Penelitian tidak menyertakan pengujian statistik, pemetaan pilihan individual terhadap hasil penghitungan suara, atau perbandingan sistematis antara calon pemberi dan calon yang tidak memberi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya pengaruh yang dirasakan informan terhadap motivasi dan preferensi memilih.

Keterangan mengenai penerimaan dari beberapa calon serta ketidakpastian kemenangan memperkaya pembacaan temuan. Uang berperan sebagai sarana membangun kedekatan dan menarik perhatian pemilih. Keputusan akhir tetap perlu dipahami melalui ragam pertimbangan yang muncul dalam wawancara. Kajian Aspinall dan Berenschot (2019) menempatkan hubungan material dalam lanskap politik Indonesia yang luas. Temuan Desa Bea memberi uraian setempat mengenai bahasa pemberian, pengalaman warga, dan penilaian mereka terhadap calon.

8 Peran Peluncur dan Pemaknaan Hubungan Transaksional

Peluncur menempati posisi penghubung antara calon dengan pemilih. Naskah menggambarkan kepercayaan calon kepada orang setempat untuk menyalurkan amplop kepada warga. Penyalur hadir dalam kutipan Wa Fae, La Silimani, dan Wa Afi. Penyebutan tersebut menunjukkan bahwa pengalaman warga terhadap politik uang sering berlangsung melalui pertemuan dengan perantara. Calon dapat hadir dalam pengalaman pemilih melalui orang yang membawa pemberian dan menyampaikan kepentingan dukungan.

Keberadaan perantara memberi dimensi sosial pada transaksi. Pemberian dibawa oleh orang yang berada dalam jaringan hubungan lokal. Pengetahuan mengenai warga dan akses terhadap rumah tangga membantu penyaluran. Dalam pembacaan jaringan kampanye, Aspinall (2014) memperlihatkan pentingnya hubungan sosial yang menghubungkan calon, perantara, dan pemilih. Hicken et al. (2022) juga memberi perhatian pada sumber daya serta kedudukan perantara dalam distribusi pemberian. Data Desa Bea memperlihatkan bentuk lokal perantaraan melalui istilah peluncur yang digunakan warga.

Hubungan transaksional terbentuk melalui penilaian timbal balik. Calon memerlukan suara, dan sebagian warga mengharapkan manfaat yang diterima sebelum pemilihan. Uang transportasi menjadi istilah yang menghubungkan kebutuhan praktis warga dengan kepentingan elektoral calon. Harapan tersebut diperkuat oleh anggapan bahwa hubungan dengan masyarakat akan melemah setelah calon memperoleh jabatan. Pengalaman menerima uang dan pengalaman kecewa terhadap calon saling berkaitan dalam pembentukan penilaian politik.

Pembacaan melalui tindakan rasional dan motivasi kebutuhan membantu menjelaskan pertimbangan menerima pemberian. Pembacaan berorientasi nilai memberi perhatian pada penolakan yang dinyatakan

Wa Afi serta keberatan etis informan lain. Kedua arah analisis tersebut mengikuti perbedaan dalam data. Warga menilai pemberian melalui manfaat material, pengalaman berpolitik, dan keyakinan yang dijadikan pegangan. Politik uang memperoleh keberlanjutan melalui pembiasaan serta tetap menghadapi penilaian moral dalam kehidupan masyarakat.

9 Implikasi dan Batas Temuan

Temuan penelitian menunjukkan perlunya pendidikan politik yang menggunakan bahasa serta pengalaman warga. Istilah uang transportasi perlu dibicarakan bersama hubungan antara pemberian dan harapan dukungan. Penjelasan mengenai kebebasan memilih dapat dihubungkan dengan pengalaman warga menghadapi penyalur. Tokoh masyarakat dan tokoh agama juga dapat terlibat dalam percakapan mengenai etika pemilihan. Rekomendasi ini bertolak dari hadirnya pandangan penerimaan, kritik etis, dan penolakan atas dasar dosa dalam hasil wawancara.

Perhatian terhadap kebutuhan ekonomi perlu berjalan bersama penguatan hubungan pertanggungjawaban antara calon dan warga. Informan berulang kali menyebut berkurangnya perhatian setelah calon terpilih. Pengalaman tersebut memberi dasar bagi harapan akan hubungan yang lebih berkelanjutan setelah pemilu. Dalam jangka panjang, pelayanan dan keterbukaan hubungan politik menjadi bagian penting untuk membangun kembali kepercayaan. Usulan ini merupakan implikasi pembahasan dan belum menjadi program yang diuji melalui penelitian.

Batas penelitian terletak pada sifat data kualitatif dalam satu desa. Temuan menjelaskan pengalaman informan dan tidak menyatakan proporsi sikap seluruh penduduk. Keterangan mengenai pengaruh uang terhadap keterpilihan merupakan persepsi yang memerlukan pembacaan sesuai sumbernya. Perkiraan nominal juga tidak dapat digunakan sebagai ukuran keseluruhan peredaran uang. Penelitian selanjutnya dapat menelusuri hubungan antara penyaluran pemberian, jaringan perantara, dan keputusan pemilih dengan dokumentasi yang lebih terperinci.

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Bea memaknai politik uang melalui manfaat material, pertimbangan agama, dan etika pemilihan. Sebagian informan menerima pemberian sebagai uang transportasi serta kesempatan memperoleh uang menjelang pemilu. Penerimaan berkaitan dengan kebutuhan praktis, kebiasaan di lingkungan sosial, dan pengalaman mengenai calon yang kurang memperhatikan warga setelah terpilih. Penolakan atas dasar dosa dan kritik terhadap pembelian suara menunjukkan keberagaman pandangan dalam masyarakat.

Politik uang berpengaruh terhadap motivasi menggunakan hak pilih dan preferensi calon menurut keterangan informan. Peluncur menghubungkan calon dengan warga melalui penyaluran pemberian. Uang dinilai memperbesar peluang memperoleh dukungan, dan keterangan informan juga mengakui ketidakpastian keterpilihan calon pemberi uang. Kesimpulan ini bersifat kualitatif dan tidak menetapkan besaran pengaruh terhadap hasil pemilu. Temuan mendukung perlunya pendidikan politik yang dekat dengan pengalaman warga, penguatan pengawasan partisipatif, perhatian pada kebutuhan ekonomi, serta hubungan pertanggungjawaban yang berkelanjutan antara pemimpin dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E. (2014a). Indonesia's 2014 elections: Parliament and patronage. *Journal of Democracy, 25*(4), 96–110. https://doi.org/10.1353/jod.2014.0070

Aspinall, E. (2014b). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies, 46*(4), 545–570. https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies, 48*(1), 31–52. https://doi.org/10.1017/S0022463416000461

Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies, 17*(1), 1–27. https://doi.org/10.1017/jea.2016.31

Baehaki, K. (2021). Gagalnya pencegahan money politik pada pemilihan kepala daerah. *Philosophia Law Review, 1*(1), 39–56. https://doi.org/10.56591/pilar.v1i1.10775

Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies, 51*(12), 1563–1593. https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Djuyandi, Y., & Mahmuda, D. (2024). Phenomenon of the "dawn attacks operation" as a money politics practices in Indonesian election. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14*(2), 318–332. https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14239

Fitriani, L. U., Karyadi, L. W., & Chaniago, D. S. (2019). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilihan calon anggota legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 1*(1), 53–61. https://doi.org/10.29303/resiprokal.v1i1.5

Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2022). Buying brokers: Electoral handouts beyond clientelism in a weak-party state. *World Politics, 74*(1), 77–120. https://doi.org/10.1017/S0043887121000216

Lukmajati, D. (2016). Praktek politik uang dalam pemilu legislatif 2014 (Studi kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 7*(1), 138–159. https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.138-159

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review, 50*(4), 370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346

Muhtadi, B. (2013). Politik uang dan dinamika elektoral di Indonesia: Sebuah kajian awal interaksi antara "Party-ID" dan patron-klien. *Jurnal Penelitian Politik, 10*(1), 41–57. https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217

Spradley, J. P. (1997). *Metode etnografi*. Tiara Wacana.

Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization (A*. M. Henderson & T. Parsons, Trans.; T. Parsons, Ed.). Oxford University Press.